**Peran Komunikasi Politik Elit Tradisional**

**dalam Konstalasi Politik Lokal**

**1Faisal Idris Rumalutur**

1Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

E-mail: 1idrisfaisal86@gmail.com

***Abstrak.*** *Pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung merupakan salah satu kemajuan demokrasi di Indonesia. PILKADA yang dilakukan sebelumnya melalui lembaga legislatif, dirasakan tidak mencerminkan keinginan langsung masyarakat selaku konstituen. Namun, demokrasi langsung pada level local ini ternyata disatu sisi menguatkan tatanan sosial tradisional yang sudah hidup sejak awal di masyarakat. Relasi-relasi lama ini digunakan oleh para elit politik tradisional untuk memenangkan suksesi politik di daerah. PILKADA langsung serentak di kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 memperlihatkan bagaimana relasi-relasi sosial lama atau tradisional ini digunakan sebagai alat dan media komunikasi politik.*

***Kata kunci:*** *Komunikasi Politik, Elit Politik Tradisional, Elit Tradisional.*

**INTRODUCTION**

Perubahan yang terjadi pada sistem politik berdampak terhadap hubungan antara elit dengan massa, juga pada hubungan antara elit dengan negara. Perubahan yang terjadi menjadikan massa tidak lagi sebagai objek yang pasif dalam hubungannya dengan elit. Demikian pula elit, untuk mempertahankan posisinya tidak bisa hanya dengan menyandarkan pada negara (pemerintah), tetapi harus mampu melakukan kalkulasi taktis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, di kalangan internal elit berlangsung dinamika, dimana masing-masing individu elit saling bersaing untuk mempertahankan posisi dan peranannya. Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan sistem politik, elit politik lokal harus mampu menyusun strategi untuk bisa meraih dan mempertahankan kepentingannya.

Terkait dengan fenomena ini, Peneliti melihat adanya pengaruh dan peran yang kuat dari komunikasi politik elit tradisional pada politik lokal, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada momentum politik seperti pemilihan Legislatif, Bupati, dan Gubernur, elit tradisional atau Raja masih menjadi tokoh sentral dalam penentuan pilihan politik masyarakatnya. Selain menjadi tokoh sentral dan simbol politik, elit tradisional juga di anggap menjadi kriteria pimimpin ideal baik dalam konteks politik maupun adat.

Sejak bergulirnya sistem pemilihan langsung secara serentak pada periode pertama tahun 2015 yang lalu, dinamika politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang sangat dinamis. Elit tradisional saling bersaing untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini terjadi karena persaingan dalam pemilihan secara langsung (baik PILBUP, PILGUB, mupun PEMILU) telah menjelma menjadi perburuan kekuasaan dan kepentingan. Dengan demikian, persaingan antara elit politik lokal dapat dimaknai sebagai situasi yang menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili. Perbedaan itu bisa bersifat ideologis atau kebijakan, khususnya kebijakan yang hanya menguntungkan seseorang atau sekelompok orang saja. Kebijakan seperti ini merupakan konsekuensi perburuan kepentingan yang dilakukan politisi. Para politisi melihat jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif sebagai gerbang untuk menjalankan perburuan kekuasaan, bukan untuk mewujudkan tujuan politik yang bersifat substantif. Substansi dari tujuan politik adalah perjuangan akan kebenaran dan keadilan yang berpihak pada masyarakat.

Pemilihan Bupati (PILBUP) atau Pemilhan Kepala Daera (PILKADA) secara langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elit vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini. Permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik yang terkadang memunculkan konflik. PILKADA secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada aras lokal. Kedudukan Kepala Daerah sebelumnya (pada era orde lama dan orde baru) ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Saat ini hal tersebut berbalik, masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

**METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang mendasarkan diri pada interpretif. Penelitian ini juga di desain dengan studi kasus, Penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan perpektif transenden.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian tentang komunikasi politik adalah dikarenakan bukan hanya konsep tentang peran komunikasi politik sulit, dan mungkin tidak bisa diukur dengan angka-angka, tetapi juga karena peran komunikasi politik mempunyai penilaian yang bersifat kualitatif. Penggunana metode kualitatif ini diharapakan dapat menggali dan menilai peran komunikasi politik elit tradisional dalam konstalasi politik lokal pada pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur karena bagaimanpun Penilaian kualitatif ini menyangkut persepsi, pendapat, gambaran, pemahaman, pengetahuan seseorang terhadap suatu objek yang nilainya sangat tergantung pada jawaban yang membutuhkan penjelasan mendalam berdasarkan apa yang diketahuinya. Bukan berarti bahwa penelitian tentang komunikasi politik tidak menggunakan data-data kuantitatif, melainkan sebelum menganalis sebuah komunikasi politik setiap orang tentunya dituntut untuk mendalami setiap aspek secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif berusaha menemukan teori, teori substantif atau formal yang kesemuanya jelas berasal dari data (Moleong, 2000: 29”.

Subjek penelitian atau Informan utama dalam penelitian ini adalah Abdul Mukti Keliobas (MK). MK merupakan elit politik tradisional yang menjadi salah satu kontestan dalam PILKADA serentak di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2015. MK adalah raja di negeri/desa Amarsekaru. Amarsekaru merupakan salah satu negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di kecamatan Pulau Gorom. Sistem kepemimpinan di Negeri Amarsekaru didasarkan pada garis keturunan. Sebagai salah satu anak laki-laki dari raja Amarsekaru, MK mewarisi jabatan tersebut dari kakak laki-lakinya yang meninggal. Kharisma dan mentalnya sebagai pemimpin tradisional di negerinya, mengalir juga kedalam urusan politik.

Pesan politik yang disampaikan oleh elit tradisional kepada massa-nya atau klien-nya tidak dilakukan dengan cara paksaan, namun melalui aktifitas yang disebut “duduk bacarita”. Duduk bacarita merupakan model komunikasi ala masyarakat Maluku dimana terdapat banyak orang dalam satu pertemuan untuk membicarakan berbagai persoalan dengan semangat kekeluargaan. Melalui media dudu bacarita, konstituen merasa sangat dihargai. Biasanya apa yang disampaikan dan disepakati dalam pertemuan tersebut sangat kuat dipegang oleh masyarakat.

Sebagai seorang raja di negeri adat, ia memiliki kewibawaan dan mendapatkan penghormatan yang tinggi oleh masyarakatnya. Masyarakat di negerinya bahkan rela berkorban untuk mempertahan kewibawaan dan harga diri MK.

MK bukan saja menjadi patron tradisional di kampungnya, ia juga menjadi elit politik di Seram Bagian Timur sejak tahun 2004 sampai saat ini. Karir politik MK di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dibilang sangat progresif. Sejak awal memasuki panggung politik, ia langsung diberikan kepercayaan oleh konstituen untuk duduk sebagai anggota legislatif kabupaten

Dalam PILKADA serentak tahun 2015 di Kabupaten Seram Bagian Timur kemarin, berbagai cara dilakukan oleh MK dan pasangannya dan/atau Relawan sehingga mereka dapat memenangkan suksesi politik tersebut. MK dengan popularitas dia sebagai tokoh adat (Raja salah satu negeri/desa di kepulauan Gorom) dan politisi lokal yang sukses karirnya berupaya menunjukkan kepribadian dan kewibawaannya kepada konstituen. Keunggulan individu yang dimiliki MK ini menjadi isi pesan yang disebarluaskan dengan berbagai cara untuk meyakinkan masyarakat Seram Bagian Timur bahwa dia memang layak dipilih dan memimpin daerah tersebut.

Selain pesan yang disampaikan secara langsung melalui relawan pada tokoh-tokoh masyarakat di setiap desa di Seram Bagian Timur. Relawan MK juga menggunakan media seperti baliho dan spanduk untuk menyampaikan pesan dari pasangan MUFAKAT kepada konstituen

PILKADA serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Seram Bagian Timur dimenangkan oleh pasangan MUFAKAT. KPUD Kabuapten Seram Bagian Timur pada tanggal 18 Desember menetapkan pasangan MUFAKAT menang dengan perolehan suara sebanyak 36.959 (54,33%). Sedangkan SUSGO mendapatkan suara 31.071 (45,67%). Penetapan KPUD ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU SBT Nomor:34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 pada tanggal 18 Desember 2015

**RESULTS AND DISCUSSION**

Latarbelakang dalam konteks penelitian ini merupakan kondisi dan situasi tertentu yang mendorong individu untuk bertindak. Dalam pemahaman demikian, latarbelakang memiliki arti yang sama dengan alasan untuk bertindak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Abdul Mukti Keliobas dan Tim Sukses-nya sebagaimana telah diuraikan diatas, alasan yang mendorong MK sebagai elit politk tradisional maju sebagai calon Bupati pada PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 dapat dikategorisasikan menjadi dua. Kategori pertama adalah “latarbelakang internal”, dan kedua, “latarbelakang eksternal”.

Latarbelakang internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri MK sehingga ia menetapkan niat untuk mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya sebagai calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagaimana temuan peelitian diatas, MK menyampaikan bahwa niatnya maju sebagai calon Bupati didorong oleh realitas sosial yang ia lihat sendiri di Kabupaten Seram bagian Timur. Minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas public, dan persoalan ekonomi yang sering dikeluhkan oleh masyarakat secara langsung kepadanya membuat rasa kepeduliannya sebagai anak daerah tergugah. Pengalaman kalah dari incumbent pada PILKADA sebelumnya tidak dihiraukan, walaupun PILKADA tahun 2015 diikuti juga oleh incumbent (Wakil Bupati periode sebelumnya).

Selain latar belakang internal, MK didorong juga oleh apa yang Peniliti sebut dengan istilah latarbelakang eksternal. Latarbelakang eksternal merupakan dorongan yang berasal dari luar diri MK. Dorongan eksternal ini dapat berasal dari keluarga, rekan politik, simpatisan, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai seorang Raja, MK bukan hanya sebagai individu tetapi juga dilihat sebagai representasi dari elit tradisional keluarganya. Keluarga MK memberikan dorongan yang luar biasa. Hal ini terkonfirmasi melalui pengamatan Peneliti, keluarga MK solid dalam mengkonsolidasikan jejaring keluarga yang secara tradisional berhubungan dengan beberapa desa di kecamatan Pulau Gorom. hal ini berdampak terhadap kemenangan telak MK di kecamatan Pulau Gorom.

Disisi yang lain, relawan atau relawan MUFAKAT melihat bahwa MK adalah figur yang tepat yang dapat membawa Kabupaten ini ke arah perubahan yang lebih baik. Kondisi sosial Kabupaten Seram Bagian Timur setelah 11 tahun pemekaran (terhitung dari tahun 2004) belum menunjukkan perubahan yang berarti. Hal-hal ini menjadi alasan mereka untuk berjuang bersama MK dalam PILKADA tahun 2005.

Latarbelakang eksternal juga berasal dari rekan-rekan politisi dari partai GOLKAR. MK dinilai sebagai kader patai Golkar yang sukses dan sangat populer dimasyarakat pantas untuk maju sebagai Calon Bupati pada PILKADA tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan dukungan 100% dari DPD II partai Golkar Kabupaten SBT yang mengusungnya ke DPP Golkar untuk mendapatkan rekomendasi partai. Tanpa dukungan dari rekan-rekan separtainya di DPD II Parati Golkar Kabupaten seram Bagian Timur, dukungan politik dalam bentuk rekomendasi sukar didapat.

Latar belakang internal dan eksternal yang membuat MK kembali menjadi kontestan dalam PILKADA tahun 2015, dapat ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.



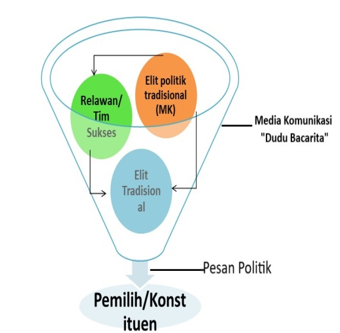
GAMBAR 4.1 Latarbelakang dominan Abdul Mukti Keliobas menjadi calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015

Dorongan kesadaran diri untuk adanya perubahan sosial dan tanggung jawab moral menjadi dorongan latarbelakang dominan untuk bertindak atau terlibat dalam politik. Pemaknanan dominan dalam hasil penelitian ini adalah jawaban-jawaban yang di berikan oleh subjek penelitian tentang latarbelang maju dalam pencalonan PILKADA serentak Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pesan berupa visi-misi pasangan calon MUFAKAT yang disampaikan melalui kampanye atau media lainnya kepada konstituen secara langsung bukan menjadi factor dominan keterpilihan mereka pada PILKADA tahun 2015. Kemenangan MUFAKAT pada PILKADA disebabkan oleh penggunaan model komunikasi politik yang peneliti sebut dengan istilah “komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional”.

Bagaimana model komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional? Dari wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan, baik MUFAKAT maupun tim suksesnya menyampaikan pesan berupa visi-misi dari pasangan ini melalui raja, tokoh masyarakat, imam masjid yang berpengaruh di suatu desa atau wilayah. Raja, tokoh masyarakat dan imam pada level tertentu merupakan elit tradisional bagi komunitas atau masyarakatnya. Menurut relawan MUFAKAT, setiap kali datang ke suatu desa untuk menyosialisasikan kandidat, yang ditemui adalah elit tradisional di kampung tersebut. Hal ini dilakukan karena pemilih pada suatu desa

pesan politik tidak disampaikan oleh kandidat secara langsung ke pemilih, namun melalui komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional. Walaupun MK sebagai elit politik tradisional, namun tanpa dukungan jejaring elit tradisional ia tidak akan mungkin mengalahkan incumbent. Komunikasi politik berbasis jaringan elit politik tradisional dilaksanakan oleh kontestan, relawan politik, dan elit tradisional. Komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional dapat digambarkan sebagai berikut ini:.



GAMBAR 4.2 Komunikasi Politik Berbasis Jaringan Elit Tradisional

Gambar diatas menunjukan bahwa elit politik tradisional atau dalam hal ini MK tidak mengkomunikasikan pesan politiknya langsung kepada pemilih, tetapi disampaikan kepada relawan politik dan elit tradisional dalam suatu wilayah tertentu. Relawan politik juga tidak mengkomunikasikan pesan politik secara langsung ke pemilih, namun ia menyampaikan juga ke elit tradisional. Elit tradisional adalah pihak yang berkomunikasi langsung dengan pemilih untuk penyampaian pesan politik kontestan.

Figur MK sebagai elit tradisional sangat mempengaruhi dirinya untuk mengambil keputusan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pada PILKADA tahun 2015. Menurut MK, kedekatan dirinya dengan masyarakat karena posisinya sebagai Raja membuat ia merasakan langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat di wilayah tradisionalnya. Masyarakat tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan langsung keluhan tersebut. Sebagai orang yang sangat dekat dengan rakyat kecil, sebagai raja, rasa keadilannya tergugah untuk memperjuangkan persoalan-persoalan masyarakat. Pergolakan dalam dirinya terkait berbagai persoalan yang dialami oleh rakyat SBT ini mendorongnya untuk mengambil keputusan bertarung kembali untuk yang kedua kalinya pada PILKADA tahun 2015. Peneliti mengkategorisasikan dorongan ini sebagai “dorongan internal”.

Pertanyaan penting terkait fenomena ini adalah “Mengapa masyarakat memilih mengadukan persoalan mereka ke MK?” dan “Mengapa MK merasa dirinya pantas memprjuangkan perosoalan-persoalan yang dialami masyarakat tersebut, sehingga mendorongnya maju sebagai calon Bupati pada PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015.” Pertanyaan dengan menggunakan kata Tanya “mengapa” merupakan cara untuk merefeleksikan secara konseptual fenomena-fenomena riil yang muncul di masyarakat atau dalam konteks ini pada PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015. Dua pertanyaan konseptual ini akan membimbing peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, “Bagaimana latar belakang Elit Tradisional dalam PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015?”

Dari fenomena berupa keluhan masyarakat ke Abdul Mukti Keliobas (MK), ada dua hal yang penting menurut peneliti untuk didiskusikan. Pertama, masyarakat merasa tidak mampu memperjuangkan persoalan mereka. Kedua, masyarakat menilai MK figur yang layak untuk memperjuangkan persoalan tersebut.

Dua hal ini menurut peneliti mengkonfirmasi konsep elit dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Menurut peneliti, ada kesadaran masyarakat bahwa individu tertentu memiliki kemampuan yang dapat diberikan tanggung jawab untuk mengatasi berbagai persoalan mereka. Individu-individu tertentu ini lah yang disebut oleh Aristoteles sebagai “elit”.

Selain adanya kesadaran pada masyarakat, disisi yang lain elit juga memiliki kesadaran bahwa ia memang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan atau mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga ada semacam relasi yang terbentuk pada level kesadaran antara masyarakat dengan elit. Relasi ini terbentuk karena adanya trust kelompok yang memberikan tanggungjawab dengan individu yang menerima tanggungjawab.

Trust tidak terbentuk begitu saja, dari pengamatan yang dilakukan, peneliti melihat hal ini ada hubungannya dengan sosok beliau sebagai tokoh adat atau raja yang sebelumnya sudah dekat dengan masyarakat. Konsep Keller tentang elit tradisional menjadi sandaran konseptual untuk memahami fenomena ini. Keller (1995) menyampaikan, Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Jadi, sebelum MK terlibat dalam politik, ia sudah lebih dulu menjadi elit tradisional. Kepercayaan masyarakat kepadanya dilatarbelakangi oleh posisinya sebagai elit tradisional.

Bagi elit atau dalam konteks ini adalah MK, keluhan masyarakat tentang persoalan mereka menunjukan bahwa mereka masih menaruh kepercayaan politik yang besar untuk dirinya. Disini identitas MK berubah dari elit tradisional menjadi elit politik tradisional, karena adanya kepentingan politik masyarakat yang dibebankan kepada dirinya.

Namun, dorongan internal saja tidak cukup menjadi latarbelakang MK yang memutuskan menjadi elit politik tradisional pada PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015. Temuan peneliti menunjukan adanya dorongan eksternal, walaupun tidak menjadi factor yang dominan. Dorongan eksternal ini juga merujuk pada figur yang memutuskan untuk menjadi kontestan politik. Dorongan keluarga, kepercayaan rekan politik se-partai atau dari partai lain yang mengusung-nya, serta elit-elit tradisional yang bersedia menjadi relawan dapat diinterpretasikan bahwa elemen politik di daerah ini sangat menaruh harapan kepada figur MK. Hal ini yang peneliti sebut sebagai dorongan eksternal.

Pada titik ini menurut peneliti, figur atau kepribadian elit menjadi sesuatu yang penting bagi kontestan politik. Kepribadian dan pengalaman seorang figur dapat mendorong dirinya untuk membuat keputusan politik yang penting. Kepribadian dan Figur juga menggerakan orang lain untuk memberikan dorongan politik. Latarbelakang elit politik tradisional itu sangat kompleks, berbagai relasi dan kepentingan saling silang sengkarut.

Masyarakat Seram Timur memiliki tradisi “matoran kalifan”. Matoran kalifan dapat diartikan sebagai “duduk diatas tikar” atau dalam dialek melayu ambon disebut juga dengan istilah “dudu bacarita”. Tradisi matoran kalifan biasanya digunakan oleh beberapa orang (lebih dari satu orang) untuk membicarakan berbagai hal yang penting. Matoran kalifan dilakukan dengan cara yang penuh dengan rasa kekeluargaan, sehingga kadang perbedaan pendapat yang muncul dalam komunikasi tersebut dapat diselesaikan dan apa yang ingin dibicarakan dapat berjalan dengan baik.

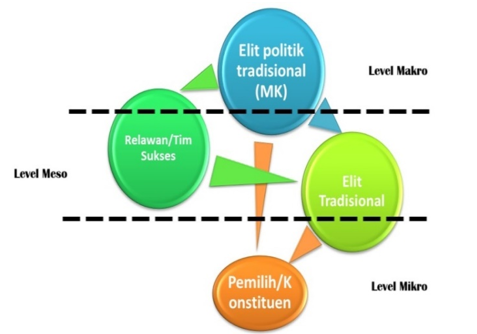
Tradisi matoran kalifan atau dudu bacarita ini digunakan oleh elit tradisional sebagai media untuk mengkomunikasikan pesan politik dari pasangan MUFAKAT. Matoran kalifan atau dudu bacarita sebgaai media komunikasi politik ini bersinggungan dengan relasi patron-klien yang ada dalam suatu wilayah atau desa. Namun tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, relasi patron-klien yang digunakan tidak menempatkan klien benar-benar berada pada posisi pasif atau hanya mengikuti perintah patron. Karena dalam tradisi matoran kalifan, klien dianggap oleh patron sebgaai subjek, sehinggga komunikasi yang terjadi mempertimbangkan kepentingan dua arah atau kepentingan penyampai pesan dan penerima pesan. Kontestan mendengar keinginan elit tradisional, relawan mendengar keinginan elit tradisional, elit tradisional mendengar juga keinginan konstituen atau pemilih, dan Pemilih atau konstituen juga mendengar dan mengikuti kenginan elit tradisional.

Seperti yang sudah peneliti singgung sebelumnya (pada bagian analisis) dan uraian diatas, komunikasi politik terjadi melalui jaringan berbasis elit tradisional. sementara retorika politik yang digunakan untuk mengkomunikasikan kepentingan politik disandarkan pada media yang berbasis tradisi atau kebudayaan masyarakat setempat. Temuan peneliti menunjukan bahwa model komunikasi yang digunakan ini yang membuat pasangan MUFAKAT dapat memenangkan PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015.

Pertanyaan penting dari realitas ini adalah mengapat kontestan poilitik atau tim suksesnya melakukan komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional? untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti kembali ke esensi komunikasi. Sepanjang hidupnya manusia tidak bisa lepas dari proses komunikasi dan interaksi. Dalam proses komunikasi, sikap/perilaku/atribut seseorang ditentukan oleh lingkungan dan dengan siapa ia berinteraksi, di mana pengaruh tersebut dapat disadari maupun tidak. Dengan berkomunikasi dan menjalin relasi, maka manusia telah membentuk “jaringan social”.

Ketika suksesi politik terjadi di level daerah (PILKADA), masyarakat pada level mikro (baca: desa) telah terbentuk jaringan sosial-nya. Sehingga, kontestan atau relawan tidak akan mungkin secara langsung masuk kedalam jaringan pada level mikro tersebut. Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto: 2006), jaringan merupakan moda organisasi dari sistem yang kompleks yang terbentuk secara alamiah dalam suatu masyarakat. Kontestan politik atau relawan politik yang baru muncul ketika suksesi politik dilaksanakan tidak akan mungkin masuk kedalam jaringan yang sudah terbentuk secara alamiah pada suatu komunitas (desa). Lantas bagaimana pesan politik dari kontestan dapat sampai ke pemilih? Tidak ada jalan lain selain membangun jaringan dengan patron atau dalam konteks ini elit tradisional dalam masyarakat tersebut. Dari sini kemudian muncul jaringan yang kompleks karena tersusun berlapis-lapis mulai dari level mikro sampai level makro. Van Dijk (dalam Eriyanto: 2006) mendeskripsikan jaringan sosial sebagai sistem sosial dengan ikatan konkret dalam hubungan yang abstrak. Artinya, jaringan sosial terdiri dari pelaku sosial-sebagai nodes, yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan-alias link.

Lapisan Jaringan komunikasi politik pada PILKADA Seram Bagian Timur tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

****

GAMBAR 4.3 Jaringan Komunikasi Politik Yang Berlapis pada PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015

Lewat gambar ini peneliti ingin menunjukan bahwa komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional itu memeliki lapisan-lapisan. Lapisan pertama atau peneliti sebut “lapisan makro” merupakan lapisan dimana terjadi komunikasi politik antara kontestan politik atau MK dengan relawan politik dan elit tradisional. Mengapa ini disebut lapisan makro? Pada lapisan ini pesan politik yang diterima oleh relawan elit tradisional itu berasal langsung dari MK atai pihak yang berkepentingan dalam suksesi politik. Sementara lapisan “meso” merupakan ruang komunikasi antara relawan politik dengan elit tradisional. Pada lapisan ini, pesan politik yang diterima oleh elit tradisional berasal dari orang kedua, yakni relawan politik. Dan yang ketiga lapisan mikro. Lapisan mikro merupakan lapisan dimana pesan politik diterima oleh pemilih atau konstituen.

**CONCLUSION**

Temuan, analisis, dan pembahasan hasil penelitian tentang Peran Komunikasi Politik Elit Tradisional Dalam Konstalasi Politik Lokal, dapat disimpulkan oleh Peneliti sebagai berikut:

Latarbelakang merupakan kondisi atau situasi tertentu yang mendorong individu untuk bertindak. Dalam pemahaman demikian, tarbelakang memiliki arti yang sama dengan alasan untuk bertindak. Keputusan MK untuk maju sebagai kontestan dalam PILKADA Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 dipengaruhi oleh dorongan internal dan dorongan eksternal. Figurnya sebagai elit tradisional merupakan jangkar yang menggerakan dirinya untuk mengambil keputusan politik di tahun 2015. Dorongan yang muncul dalam dirinya merupakan respons atas fenomena dan interaksi sosial dia dengan masyarakat Seram Bagian Timur. Selain adanya dorongan internal, alasan MK memutuskan maju sebagai kontestan politik juga di pengaruhi oleh dorongan eksternal. Situasi ekonomi masyarakat, dukungan elit tradisional keluarga, dukungan politik rekan se-partai dan partai lain, dukungan elit tradisional yang ada di Seram Bagian Timur membuat MK memantapkan niatnya tersebut.

Temuan penelitian ini menunjukan ada kecenderungan masyarakat mengharapkan persoalan mereka dapat diselesaikan oleh individu tertentu. Fakta ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa sejak zaman demokrasi klasik di Yunani sampai saat ini, persoalan masyarakat selalu dibebankan kepada seseorang yang dapat disebut sebagai “elit”. Gagasan elit oleh Plato dan Aristoteles sampai saat ini masih relevan digunakan. Latarbelakang MK sebagai elit tradisional di nilai dapat memperjuangkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat Seram Bagian Timur. Identitas MK berubah dari elit tradisional menjadi elit politik tradisional ketika ia mengambil keputusan politik untuk mengemban amanah masyarakat Seram Bagian Timur.

Keputusan politik yang diambil oleh MK untuk memikul amanah masyarakat terkait dengan penyelesaian berbagai persoalan ekonomi tidak akan terwujud tanpa adanya komunikasi politik yang baik ketika berlangsungnya PILKADA tahun 2015. Kemenangan Pasangan MUFAKAT adalah kemenangan elit tradisional dalam memainkan peran komunikasi politik. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Pasangan MUFAKAT adalah komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional. komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional ini dimainkan sendiri oleh MK selaku elit tradisional di daerahnya, Relawan politiknya, dan elit tradisional di desa atau wilayah tertentu. Komunikasi politik dilakukan oleh elit tradisional dengan menggunakan media yang mengakar pada budaya masyarakat Seram Bagian Timur, yakni matoran kalifan atau dudu bacarita. Komunikasi politik berbasis jaringan elit tradisional dan media kultural ini sangat efektif untuk mengkomunikasikan pesan politik dari kontestan politik kepada konstituen atau pemilih.

Demokrasi lokal yang berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015 memperlihatkan kepada kita kuatnya simbol kultural yang melekat pada elit politik tradisional. Simbol kultural berupa “raja” yang melekat pada MK menggerakan pemilih pada wilayah tradisionalnya untuk memilih pasangan MUFAKAT. Selain itu, pilihan politik masyarakat juga sangat ditentukan oleh pilihan politik elit tradisional mereka. Fenomena ini mengungkapkan adanya relasi “patron-klien” dalam pilihan politik konstituen. Namun relasi patron-klien dalam proses politik ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dilakukan dengan strategi komunikasi politik yang baik yang mengakar pada tradisi masyarakat. Pilihan politik pemilih berkaitan secara langsung dengan strategi komunikasi politik yang digunakan oleh kontestan politik, relawan politik, dan elit tradisional.

**REFERENCES**

Arifin (2011). *Komunikasi Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Burhan Bungin (2007). *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.

Dan Nimmo (2006). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Faturrahman,D. dan Sobari,B. (2002) *Pengantar Ilmu Politik*, UMM Press, Malang.

Eriyanto (2006). *Analisis Jaringan Komunikasi*, Kencana, Jakarta.

Effendi (2002). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Hafid Cangara (2006). Komunikasi Politik, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Nordholt, H.S dan Klinken, G.V. (2014). *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Irawan (2006) *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Jhon W. Creswell, (2002). *Research Designe Qualitative & Quantitative Approaches: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif,* Alih Bahasa Edisi Revisi Cetakan ke II, KIK Press, Jakarta.

Meriam Budiarjo (2008). Dasar – Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi, PT Gramedia Utama, Jakarta.

Moleong Lexy J (2002), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Rauf, M. (1993). *Indonesia Dan Komunikasi Politik*, PT Gramedia & Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Patton, M. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nasution (2006), *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.

Agus, S (2006), *Teori dan Paradigma Penelitian*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sastroadmodjo, S. (2005). *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang.

Kaller, S. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elit*, Rajawali-YIIS, Jakarta.

Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik*, PT Gramedia Utama, Jakarta.

Yusron, (2009). *Elit Lokal dan Civil Society*, Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.